

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan suatu bagian dari tatanan hukum yang berlaku di suatu negara yang berisikan perbuatan yang dilarang atau tindakan pidana itu sendiri, dalam hal apa dan dengan bagaimana seseorang itu dinyatakan melakukan tindak pidana (pertanggung jawaban pidana) dan pemberian sanksi atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.¹

Perbuatan yang dilarang atau tindak pidana yang dimaksudkan tersebut terbagi menjadi beberapa ruang lingkup, yakni lingkup tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP. Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang pengadilan diluar KUHP. Salah satu yang termasuk tindak pidana khusus adalah Hukum Pidana Militer.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap negara dipastikan harus selalu ada kekuatan militer untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan dan kedaulatan sebuah negara. Seperti halnya Negara-negara di dunia, Indonesia juga mempunyai kekuasaan

¹ Prof.Moeljatno,S.H.,2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta

militer yang sering disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan adanya perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju serta telah terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia maka pihak pemerintah mengeluarkan UU N0.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan tujuan agar tugas dari TNI akan terlaksana dengan baik dan terfokus.²

Sesuai apa yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 3 yaitu tentang Pertahanan dan Keamanan, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. Pasal tersebut menyimpulkan bahwa Tentara Indonesia kita memiliki tugas pokok yaitu mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Militer adalah orang yang disiapkan untuk melaksanakan pembelaan keamanan negara dengan menggunakan senjata atau bertempur, maka prajurit TNI dilatih, dididik, untuk mematuhi perintah-perintah atau putusan tanpa membantah, dan melaksanakan perintah-perintah atau putusan-putusan tersebut dengan cara yang efisien dan efektif.³

²http://lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=354temid%3D354&Itemid=6, diakses 27 September 2015.

³ Brigjen TNI Amiroeddin Sjarif, S.H., Disiplin Militer dan pembinaannya, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 19

Agar setiap anggota TNI dapat tetap mematuhi dan menaati larangan-larangan dan aturan-aturan serta melaksanakan tiap kewajiban-kewajiban dari tugas prajurit maka pihak TNI membuat suatu ketentuan hukum militer. Ketentuan hukum militer tersebut diatur dalam pasal 64 UU No.34 tahun 2004, yaitu “Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara”. Apabila ada prajurit yang tidak mematuhi peraturan – peraturan hukum militer yang ada maka prajurit tersebut disebut melakukan tindak pidana militer. Salah satu tindakan Indisipliner Prajurit TNI tersebut adalah INSUBORDINASI. Maksudnya tindak pidana *insubordinasi* ini adalah seorang bawahan dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang ditujukan kepada atasannya atau komandannya. Tindakan nyata itu dapat berbentuk perbuatan dan dapat juga dengan suatu mimik atau isyarat.⁴ Insubordinasi terbagi atas lima jenis yang meliputi Insubordinasi dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, Insubordinasi dengan tindakan nyata menyerang dan melawan dengan kekerasan, Insubordinasi dengan tindakan nyata yang direncanakan terlebih dahulu, Insubordinasi dengan pelaku dua orang atau lebih secara bersatu dan terakhir adalah Insubordinasi dalam keadaan khusus tertentu.

Banyak anggota TNI yang melakukan tindak pidana maupun melanggar disiplin. Misalnya dalam melakukan hal tindak pidana, seorang prajurit bisa

⁴ Pasraman Widya Guna Santhi Bukit, 2013, *Pidana Militer Definisi Hukum*.
<https://www.facebook.com/pasramanwgs/posts/434124183376208> , diakses 29 September 2015.

saja melawan seorang atasannya jika dalam keadaan emosi karena sebab-sebab tertentu, padahal seorang TNI haruslah mentaati seorang atasannya dan mengikuti perintahnya dalam melaksanakan tugas kedinasan tetapi berhubungan dengan dinas, Tindakan seperti melawan itulah yang kemudian dalam kehidupan militer disebut dengan tindak pidana insubordinasi. Insubordinasi dalam hal ini merupakan yang bersifat *criminal* atau kejahatan, yaitu pembangkangan bawahan terhadap atasan baik pada saat melakukan pekerjaan dinas maupun yang berhubungan dengan pekerjaan dinas tersebut.

Dalam perkara insubordinasi unsur-unsur yang dapat menyebabkan seorang militer di dakwa dengan Pasal 106 KUHPM tentang insubordinasi yang pertama sebagai seorang militer, unsur kedua tindakan sengaja dan nyata, dan ketiga bahwa bawahan menyerang atasannya dengan cara kekerasan sehingga mengabaikan pekerjaan dinasnya. Maksudnya adalah bahwa setiap bawahan harus menghormati atasannya, atasannya disini bukan hanya sebagai atasan langsung tetapi TNI yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari prajurit TNI yang lain.

Berbeda dengan hukum pidana umum, hukuman bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi bisa masuk ke pengadilan, bisa dengan pengaduan dari korban dan atau laporan dari atasan yang berhak menghukum. Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, proses penyelesaian tindak pidana insubordinasi di Pengadilan Militer adalah sebagai berikut :

1. Tahap penyidikan
2. Tahap penyerahan perkara
3. Tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan Militer
4. Tahap Pelaksanaan Putusan

Adanya perbedaan antara proses pengadilan pidana militer dengan pidana umum serta adanya perintah bahwa setiap anggota TNI harus tunduk pada atasannya dan harus mengikuti perintah atasannya yang mengakibatkan adanya tingkat perbedaan antara bawahan dan atasan atau dalam kemiliteran antara komandan dan prajurit. Ditambah lagi seorang anggota TNI melakukan Insubordinasi adalah hal yang tidak biasa, melihat struktur dan sistem di militer yang mengharuskan bawahan hormat dan patuh terhadap perintah atasan, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“ Pelaksanaan Ketentuan Pasal 106-109 KUHPM Tentang Insubordinasi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ketentuan tentang Tindakan Insubordinasi sebagaimana diatur di Pasal 106-109 KUHPM sudah diterapkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh Pengadilan Militer Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku Insubordinasi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah mengetahui sanksi apa yang di jatuhkan terhadap pelaku Insubordinasi di Pengadilan Militer dan Kendala apa saja yang dihadapi oleh Pengadilan Militer Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku Insubordinasi.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis :

Bagi perkembangan ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu khususnya Ilmu Hukum Pidana Militer, mengenai penjatuhan sanksi terhadap pelaku Insubordinasi di Pengadilan Militer Yogyakarta.

b. Manfaat Praktis :

1. Bagi penulis untuk mendapatkan manfaat dari penelitian hukum dan hasil dari penelitian berupa pengetahuan khususnya hukum pidana militer.
2. Bagi instansi pemerintah terutama di lingkungan militer, supaya dapat mengerti bahwa tindakan insubordinasi merupakan tindak pidana militer yang tidak sesuai dengan jati diri seorang prajurit TNI dan dapat dikenai sanksi pidana.

3. Bagi masyarakat supaya dapat mengerti bahwa prajurit TNI memiliki hukum khusus yang mengatur tingkah laku prajurit dan dapat dikenai sanksi pidana yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan karya asli penulis dengan judul **“Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Insubordinasi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta”** dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penulis atau peneliti lain.

Dalam hal isu hukum mengenai insubordinasi terdapat isu hukumnya mirip dengan karya saya, yaitu :

1. Prima Syahputra, NIM.11340061 dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan penelitian pada tahun 2014, Judul Penelitian **“Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Militer (Studi pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2014)”**,

Dengan rumusan masalah adalah :

- a. Apakah yang dimaksud dengan tindak pidana Insubordinasi?

- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Insubordinasi Nomor : 5-K/PM II-11/AD/XII/2014?

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana insubordinasi dalam militer dengan terdakwa anggota TNI.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertimbangan Hakim Militer dalam memutus perkara.

Hasil penelitian ini adalah :

Dalam mengadili terdakwa pelaku tindak pidana Insubordinasi sudah sesuai dengan hukum acara dan aturan-aturan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dalam penelitian ini terdakwa melakukan tindak pidana Insubordinasi kepada atasannya sehingga dijatuhi hukuman 4 bulan dan menetapkan selama waktu Terdakwa dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

2. Yohanes Gatot Sis Utomo, NPM : 100510292, Fakultas Hukum Universita Atma Jaya Yogyakarta, Judul Penelitian **“Pelaksanaan Pidana Terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi”**,

Dengan rumusan masalah adalah :

- a. Bagaimanakah proses beracara pidana di lingkup Pengadilan Militer dalam menangani tindak pidana Insubordinasi ?
- b. Apa saja pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Militer dalam memberikan sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi ?

Tujuan peneliti ini adalah :

- a. Untuk memperoleh data dari tahap-tahap dalam proses beracara pidana di dalam lingkup Pengadilan Militer dalam menangani tindak pidana Insubordinasi.
- b. Untuk memperoleh data yang berupa pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim di Pengadilan Militer dalam memberikan putusan sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi.

Hasil penelitian ini adalah :

Bahwa proses beracara pidana di Pengadilan Militer dalam menangani Tindak Pidana Insubordinasi tidak selalu sama dengan menangani tindak pidana militer pada umumnya, proses tersebut dilakukan melalui tahapan. Tahapan tersebut di mulai dari tahap pemyidikan oleh Oditur Militer atau ANKUM lalu tahap berikutnya adalah Tahap pelimpahan berkas perkara oleh penyidik kepada oditur militer untuk diserahkan kepada PAPERA. Kemudian diteruskan ke Pengadilan Militer dan selanjutnya dilakukan Tahap pemeriksaan di persidangan Oditur Militer.

3. Adis Nevi Yuliani, NPM : B 11109116, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, Judul Penelitian : **“Tinjauan Penanganan Kasus Insibordinasi Oleh Anggota Tentara Negara Indonesia (Studi Kasus Pengadilan Militer III-16 Makassar No: PUT/136-K/PM III-16/AD/VIII/2012)”**,

Dengan rumusan masalah adalah :

- a. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil dalam penyelesaian tindak pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI di Pengadilan Militer III-16 Makassar ?

- b. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI di Pengadilan Militer III-16 Makassar ?

Tujuan peneliti adalah :

- a. Untuk mengetahui aspek Hukum penerapan Hukum pidana Materiil pada kasus Insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI di lingkungan Pengadilan Militer III-16 Makassar.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku kasus Insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI dan Upaya Hukum yang ditempuh, sehingga dapat berjalan sesuai dengan ketentuan berlaku.

Hasil penelitian adalah :

- a. Penerapan Hukum Pidana Materiil sesuai Pasal 106 ayat (2) KUHPM dalam tindak pidana Insubordinasi oleh anggota TNI di Pengadilan Militer III-16 Makassar sudah tepat.
- b. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidak

cermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat dan pengertian mengenai “ Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Insubordinasi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta “

1. Berdasarkan Pengertian Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah

- 1) tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan 1022 undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya): *dalam aturan tata tertib harus ditegaskan apa -- nya kalau ada anggota yang melanggar aturan-aturan itu;*
- 2) tindakan (mengenai perekonomian dan sebagainya) sebagai hukuman kepada suatu negara: *Dewan Keamanan PBB mengadakan -- terhadap negara yang menyerang negara lain;*
- 3) *Huk a* imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; *b* imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum;⁵

2. Berdasarkan Pengertian Pidana

⁵ <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, 15 Desember 2013.

Pidana menurut Sudarto adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶

3. Berdasarkan Pengertian Militer

Militer adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu. Kata lain yang sangat erat dengan militer adalah militerisme, yang artinya kurang lebih perilaku tegas, kaku, agresif dan otoriter "seperti militer". Padahal pelakunya bisa saja seorang pemimpin sipil. Karena lingkungan tugasnya terutama di medan perang, militer memang dilatih dan dituntut untuk bersikap tegas dan disiplin. Dalam kehidupan militer memang dituntut adanya hirarki yang jelas dan para atasan harus mampu bertindak tegas dan berani karena yang dipimpin adalah pasukan bersenjata.⁷

4. Berdasarkan Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*", Simons merumuskan strafbaar feit adalah "suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh

⁶ <http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/08/pengertian-pidana.html>, 15 Desember 2013.

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Militer>.

seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.⁸

5. Berdasarkan Pengertian Insubordinasi

Insubordinasi adalah Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang berfokus pada peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai bahan hukum utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

⁸ <http://kuliahyata.blogspot.com/2013/10/pengertian-arti-istilah-tindak-pidana.html>, 15 Desember 2013.

⁹ Pasal 106 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat secara yuridis yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) UUD 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- 4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literature, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1) Wawancara

Wawancara adalah proses melakukan Tanya jawab secara langsung bersama Bapak Budi Supriyo sebagai kepala Subbagian Teknologi Informasi dan Laporan sebagai narasumber atau informan tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara ini dilakukan secara terpimpin dengan memperhatikan karakteristik

narasumber dengan membatasi aspek dari permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan pedoman wawancara.

2) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan primer dan sekunder berupa buku-buku, literature, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk mrndapatkan data-data yang mendukung hasil studi kasus yang dilakukan.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari lapangan, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Pertama, data primer diquantitatifkan terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya menganalisis data sekunder sebagai data pendukung, analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan hukum positif sebagai hukum primer. Metode dengan cara analisis deskriptif ini bertujuan untuk memberikan pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian dilakukannya. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang selanjutnya dianalisis untuk mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukum. Selanjutnya, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya.

Dalam menganalisis bahan hukum, untuk menarik kesimpulan digunakan proses berpikir secara deduktif. Proses berpikir deduktif adalah proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa perundang-undangan tentang sanksi terhadap pelaku insubordinasi yang kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus berupa hasil penelitian tentang Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Insubordinasi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian dari penjatuhan sanksi terhadap pelaku insubordinasi di pengadilan negeri militer 11-II yogyakarta.

BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diperlukan dengan demikian penelitian ini diharapkan membawa manfaat dan wujud kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan sumbangsih pemikiran bagi konsep hokum

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Insubordinasi

1. Pengertian Atasan dan Bawahan

Istilah atasan dan bawahan untuk konteks disiplin prajurit TNI, maka pada Pasal 1 angka 7 UU No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengatur bahwa “Atasan” adalah “setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang lain”. Istilah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa atasan identik dengan pangkat atau jabatan yang berkedudukan lebih tinggi.¹⁰

Di dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang No.26 Tahun 1997 mengatur juga definisi tentang Atasan Langsung, yaitu “atasan yang mempunyai wewenang komando langsung terhadap bawahan yang bersangkutan”. Di dalam dunia hukum militer kita sering mendengar kata “Ankum dan Papera”. Ankum adalah singkatan dari atasan yang berhak menghukum, sedangkan Papera singkatan dari perwira penyerah perkara. Kedua istilah ini dikenal dalam hukum pidana militer, Ankum yang di artikan sebagai atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Edisi Empat